

Razia Rutin Polres Karawang di Jalan Baru

JAJARAN lalu lintas Polres Karawang (Jawa Barat), sedang giat-giatnya melaku-

kan razia rutin di jalan baru antara Tanjungpura dan Warungbambu. Kegiatan razia tersebut dilakukan karena sering terjadi jambret, begal, curanmor dan razia teroris.

"Dimana jalan antara Tanjungpura dan Warungbambu-Klari sunyi dan rawan sehingga menjadi daerah operasinal criminal", kata Kasat Lantas Polres Karawang **Akp Rendy S. Permana** yang juga didampingi Kanit Patroli **Ipda Anwar** khusus kepada Visual pada saat razia di jalan baru, belum lama ini.

Kanit Patroli menambahkan jalan alternative, yaitu jalan baru harus sering diawasi pihak Polres Karawang dikarenakan daerah tersebut sering terjadi kriminal dan disamping itu daerah ini banyak cafe menjual minuman beralkohol.

Sementara itu, di pintu masuk Polres Karawang orang berkunjung ke Polres harus meninggalkan KTP tas dan jaket, pemeriksaan dilakukan untuk menghindari menyusup teroris. "Pernah tamu Polres membawa senjata tajam dan petasan lalu di BAP", ujar Wakapolres



■Tampak Kanit Patroli Lantas Polres Karawang **Ipda Anwar, SH, MH**

Karawang **Kompj Moc** riksa para pengunjung Ma-
Rano di sela-sela meme- polres. ■Piker Nainggolan

OPPTK Karawang Digelar Setiap Kecamatan



SEBAGAI upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, kembali menyelenggarakan kegiatan Optimalisasi Pelayanan Publik Terpadu Keliling (OPPTK) di tiap tiap Kecamatan se-Kabupaten Karawang di tahun ke 2, Jumat (14/7). Roadshow kegiatan tersebut

kali ini bertempat di Kantor Kecamatan Kutawaluya. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Karawang, **dr Cellica Nurrachadiana** turut meninjau langsung penyelenggaraan pelayanan publik yang dipusatkan di Kantor Kecamatan Kutawaluya tersebut. Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Publik Terpadu Keliling

sendiri merupakan implementasi dari Surat Mendagri Nomor 503/506/SJ, tanggal 28 Januari 2015, perihal Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Daerah, yang diselenggarakan dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan publik yang mudah bagi masyarakat hingga ke tingkat kecamatan. Pelayanan Publik Terpadu sendiri telah diagendakan Pemkab Karawang untuk digelar secara rutin 4 kali dalam sebulan.

Di Kantor Kecamatan Kutawaluya, warga masyarakat terlihat membludak untuk memanfaatkan berbagai jasa pelayanan yang ada. Salah satunya adalah layanan kependudukan yang diselenggarakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dalam layanan ini, masyarakat dapat membuat dan memperpanjang berbagai administrasi kependudukan seperti KTP, Kartu

Keluarga, dan Akta Kelahiran dalam tempo singkat.

Pelayanan lain diberikan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMP) Kabupaten Karawang, yang menyediakan stand khusus guna menyelenggarakan berbagai layanan perijinan yang cepat dan mudah. Sementara dari pihak BPJS Kesehatan, turut menyediakan layanan pendaftaran BPJS bagi masyarakat. Tak ketinggalan dari Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, yang turut menyediakan mobil dan ruangan khusus untuk Pelayanan KB bagi masyarakat.

Usai membuka secara resmi kegiatan OPPTK tersebut, Bupati Karawang juga sekaligus meresmikan Gedung Kantor Camat Kutawaluya yang baru, dimana OPPTK tersebut digelar.

■ **Piker Nainggolan**

Optimisme PAD 2017 Kabupaten Karawang Akan Tercapai

OPTIMISME capaian pendapatan daerah PAD Kabupaten Karawang Jawa Barat akan mencapai target 90 persen. Sampai bulan Juli sudah masuk ke kas daerah sebesar Rp.262.200.555.457, yakni mencapai 31,42 persen. Jadi untuk mencapai 100 persen tinggal lima bulan lagi, semua aparat Dispenda akan kerja ekstra untuk mencapai target PAD Tahun 2017.

Hal ini dikatakan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Karawang **Drs. H. Asikin** juga didampingi Sekdin **Warnan** khusus kepada Visual pada medio Juli silam dikantornya. Sementara itu, Kabid BPHTB **Yayat Hidayatullah**, pesimis bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang di target sebesar 300 miliar rupiah tahun 2017.

“Diduga investor masih *wait and see* karena kondisi politik dan lokasi tanah su-



Wawan

dah menipis sehingga transaksi jual beli makin berkurang”, tandas Yayat Berbeda dengan Kabid Pajak lainnya **Mustofa** dengan semangat, mengatakan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pju, pajak parkir, pajak sarang burung walet, pajak air dan pajak mineral bukan logam dan lainnya insya allah pada akhir tahun 2017 akan tercapai target.

■ **Piker Nainggolan**

Sawah Beririgasi Teknis di Karawang Semakin Menipis

RIBUAN hektar sawah beririgasi teknis di Kabupaten Karawang Jawa Barat lambat laun makin cepat beralih fungsi. Seperti yang terjadi di Karawang Barat menjadi kawasan perumahan, kawasan niaga dan hotel sudah bercokol mentereng berdiri. Memang kawasan pembangunan Karawang *interchange* tersebut sudah ada Perda Tataruang.

Namun setelah keluar Perda Tataruang Karawang Barat terbit lagi Perda Tataruang sawah beririgasi teknis untuk Karawang Timur, yakni jalan baru. Bangunan perguruan tinggi (sekolah tinggi perikanan) dan Unsika Karawang yang mengalihfungsikan ratusan hektar persawahan.

Belum pembangunan gudang alfamart, bangunan perumahan summarecon, buana asri serta SPBU. Menurut pemantauan Visual

medio Juli silam ribuan hektar di perbatasan Tunggakjati Karawang Barat dan Rengasdengklok telah dibangun pergudangan raksasa diduga belum memiliki izin membangun atau lazimnya IMB, yang mana belum ada disana karena kawasan tersebut sawah beririgasi teknis pantai utara. Alih fungsi sawah untuk pergudangan terdegradasi mencapai ribuan hektar.

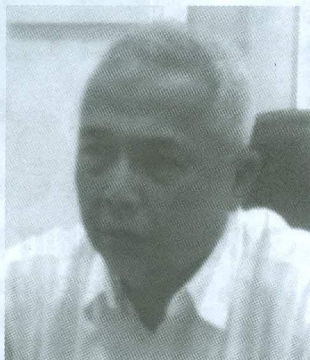
Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Karawang **Ir. Hanafih** didampingi Kabid Prasarana dan Sarana Pertanian **Ir. Hj Usmaniah**, mengatakan alih fungsi sawah beririgasi teknis di Karawang mengalami signifikan tinggal 97 ribu hektar data dari satelit. Kalau data Bappeda, BPN, BPS dan Dinas Pertanian 191.927 hektar, jelasnya. ■ **Piker Naiggolan**

PPDB Karawang, Bermasalah



■ **H. Taswan,**
Ketua Dewan Pendidikan

PENDAFTARAN peserta didik baru untuk SMPN tahun ajaran 2017 di Karawang, Jawa Barat, dinilai bermasalah. Akibat turunya Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017. Dampak regulasi yang baru tersebut kebanyakan dialami siswa yang tinggal di kota Karawang, karena nilai zonasi 40. Biar juga ditambah



■ **Dadan Sugardan,** Kadis Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Karawang

dengan UN tetap saja mereka tidak diterima di SMPN dekat lingkungannya. Belum lagi aturan standar satu kelas dan rombel dari Kemdikbud.

Hal itu dibenarkan Sahlan, warga Cepu Karangpawitan, dia tidak diterima di SMPN 3 dan SMPN 6. Saya diterima SMPN 1 Rawamerta dimana jarak dari rumah

saya 40 kilometer tidak mungkin saya sekolah disana, lebih baik tidak sekolah, ujarnya dengan nada kecewa.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Karawang dan Olahraga **Dadan Sugardan** dan Kabid SMP **Nandang Mulyana**, mengatakan sangat prihatin atas peraturan baru Kemdikbud mengakibatkan siswa di kota Karawang banyak putus sekolah. Kita sudah menganjurkan masuk sekolah swasta. Permasalahan PPDB tahun tidak ikut terbawa di daerah desa Karawang.

Ketua Dewan Pendidikan Karawang **H. Taswan**, mengharapkan Pemerintah Daerah dapat membangun unit sekolah baru di kota Karawang karena pertumbuhan penduduk makin bertambah pesat, imbuhnya.

■ **Piker Nainggolan**

Minimalisir Lakalantas, Polres Karawang Kirim Surat ke Disdikpora



■ Dari kiri-kanan: KBO Iptu Siti Barkah; Kasat Lantas Akp Rendi S Permana; Kanit Regident Iptu Undang

JAJARAN Lalu Lintas (Lalin) Polres Karawang, Jawa Barat, mengirim surat yang ditandatangani Kasat Lantas Akp Rendi S. Permana kepada instansi Disdikpora Karawang Jawa Barat,

yang isinya supaya Disdikpora, Kabid Dikdas, Guru, PGRI dan komite sekolah untuk segera mensosialisasikan siswa SMP sedarejat tidak membawa sepeda motor ke sekolah karena se-

makin sering kecelakaan roda dua.

Dikarenakan belum cukup umur bagi anak sekolah SMP untuk mengendarai sepeda motor sesuai dengan UU Lalulintas, ujar Kanit Laka Polres Karawang Iptu **Sabar Santoso**. Kemudian Kepala Disdikpora Kabupaten Karawang **Dadan Sugardan** atas adanya surat Kasat Lantas Polres Karawang sangat merespon dengan kejadian kecelakaan di TKP oleh pengemudi pemula atau siswa SMP.

Pihaknya sudah mensosialisasikan dengan para Kepala Sekolah, Komite Sekolah, K3S dan Dikdas supaya segera memberikan pengumuman oleh Kepala Sekolah dan Guru, bahwa para siswa dilarang membawa sepeda motor ke sekolah. Dadan juga menambahkan kalau siswa SMP ke sekolah bisa naik sepeda,

angkot serta kalau ada waktu diantar orang tua, ibunya.

Sementara Kabid Dikdas SMP yang juga Ketua PGRI Karawang, **Nandang Mulyana** sangat mendukung usulan Polres Karawang supaya siswa SMP tidak naik sepeda motor ke sekolah lebih banyak mudratnya dan melanggar UU Lalulintas karena belum cukup umur memiliki SIM C, tegasnya.

Bahkan Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang **Tedy Ruspendy**, di halaman Pemda pertengahan Juli silam, mengatakan pihak Pemda akan memikirkan anggaran APBD Tahun 2018 untuk pengadaan bus sekolah demi kenyamanan siswa. Juga pembangunan jembatan penyeberangan antara SMAN1, SMPN1 dan SMPN5, sering macet mengakibatkan siswa terganggu menuju sekolah.

■ **Piker Naingolan**